

# Penguatan Kelembagaan Organisasi HKBP Berbasis Sentralisasi Keuangan

Jonson Rajagukguk<sup>1</sup> Vera AR Pasaribu<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Dosen Tetap Prodi Administrasi Publik Fisipol UHN Medan  
[jonson.rguk@gmail.com](mailto:jonson.rguk@gmail.com)

**Abstrak :** Kelembagaan HKBP sebagai salah satu gereja yang terbesar di Indonesia atau Asia Tenggara masih terus melakukan penguatan tata kelola. Sebagaimana yang kita ketahui bersama permasalahan internal HKBP sebagai sebuah organisasi gereja masih jauh dari apa yang kita harapkan dari tata kelola yang bagus dan smart. Selama ini desentralisasi keuangan yang terjaid di HKBP telah menimbulkan berbagai masalah dan riak –riak yang sifatnya internal. Kebijakan desentralisasi keuangan dengan mmeberikan wewenang penuh kepada gereja di daerah misalnya telah menimbulkan kesenjangan pendapatan mislanya. Banyak para rohaniawan yang bertahan di gereja dengan sumber keuangan yang cukup besar. Dengan adanya sentralisasi keuangan diharapkan pemerataan pendapatan, mutasi rohaniawan atau pendeta bisa berjalan dengan baik dan ini akan menguatkan kelembagaan gereja. Dengan adanya sentralisasi keuangan maka diharapkan organisasi gereja bisa jadi sebuah organisasi yang bagus sehingga misi dan visi gereja bisa berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Penguatan kelembagaan, sentralisasi keuangan

**Abstract :** Institutional HKBP as one of the largest churches in Indonesia or Southeast Asia is still continuing to strengthen governance. As we all know, the internal problems of HKBP as a church organization are still far from what we expect from good and smart governance. So far, the financial decentralization that has occurred in the HKBP has caused various internal problems and ripples. The policy of financial decentralization by giving full authority to churches in the regions, for example, has created income inequality, for example. Many clergy stay in the church with substantial financial resources. With the financial centralization, it is hoped that income distribution, transfer of clergy or pastors can run well and this will strengthen church institutions. With the financial centralization, it is hoped that the church organization can become a good organization so that the mission and vision of the church can run well.

**Keywords:** Institutional strengthening, financial centralization

Organisasi merupakan system kerjasama antara dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama, organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu (<https://www.e-jurnal.com>: 2013). Gereja sebagai sebuah organisasi tentu juga punya tujuan dan misi khusus dalam rangka memberikan pelayanan kepada semua jemaatnya sebagai anggota organisasi.

Sebagai gereja terbesar di negara ini HKBP sudah seharusnya merupakan organisasi yang bisa jadi contoh (role model) dalam hal tata kelola organisasi yang bercirikan bersih, transparan, visioner, punya kases kepada publik, dan berbasis kebutuhan warga (jemaat). Mengapa tidak, HKBP punya modal untuk itu. Dengan sokongan SDM yang yang sangat mumpuni di level pendeta, jemaat yang banyak dan kritis yang punya potensi dengan karakter yang multi talenta sudah seharusnya HKBP mampu menampilkan diri sebagai sebuah organisasi yang bisa jadi teladan.

Tetapi harapan agar jadi contoh, teladan secara organisasi belum bisa terealisasi dengan baik karena gejolak, atau tantangan internal yang tidak beres. Padahal sebagais ebuah Gereja yang menconba mengimplementasikan ajaran Kristus seperti hidup jujur, hidup sederhana, hidup mengasihi, hidup mengampuni, hidup toleran, hidup kudus, hidup berpengharapan seharusnya ini jadi kekuatan HKBP

untuk jadi contoh sebagai sebuah organisasi yang bersih dan transparan dan kuat secara organisasi.

Saat ini dengan melihat internal HKBP yang bahkan bisa dibilang punya gejala, tetapi dalam tahap bisa dikendalikan aspirasi untuk membuat HKBP sebagai organisasi gereja dengan desain sentralisasi keuangan jadi sebuah kebutuhan, bahkan kalau bisa dibilang sebuah keharusan (*a must*). Mengapa tidak, dengan model desentralisasi keuangan yang banyak ketimpangan dijumpai dan banyak sisi kelemahan telah membuat tata kelola HKBP jauh dari yang kita harapkan. Sebagai contoh, dengan konsep desentralisasi keuangan ada kesenjangan pelayanan dikalangan para pelayan. Bahkan sangat miris ada istilah HKBP lahan basan dan HKBP lahan kering. Fakta ini tentu tidak bisa dinafikan sekalipun semua pelayan HKBP telah mengangkat janji bersedia ditempatkan dimana saja untuk memberitakan injil.

Perebutan gereja yang basah dan gereja yang punya sumber daya keuangan tentu jadi salah satu bahan evaluasi dan tentu jadi sisi lain kelemahan dari desentralisasi keuangan HKBP. Sekalipun dalam teori bernegara dan teori politik konsep desentralisasi lebih bagus karena adanya pendelegasian wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Tetapi dalam tubuh HKBP desentralisasi keuangan ini punya dampak yang lebih buruk karena adanya potensi kesenjangan yang ditimbulkan. Tentu sisi kelemahan desentralisasi keuangan dan sisi baik sentralisasi keuangan yang diinventarisir telah membuat HKBP untuk terus berbenah agar pelayanan kepada jemaat bisa lebih baik dan dilakukan lebih maksimal. Inilah yang menjadi latar belakang dan tujuan daripada penelitian ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk melihat sejauh mana peran dan fungsi sentralisasi keuangan di Gereja HKBP bisa berjalan dengan baik. (2). Untuk melihat bagaimana hubungan sentralisasi keuangan HKBP dengan kinerja pendeta HKBP. (3). Untuk memberikan masukan sejauh mana hubungan sentralisasi keuangan dengan tata kelola HKBP secara organisatoris.

### **Metodologi Penelitian**

Adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian yang sifatnya deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sample atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Zulkarnaen, W., et.all. 2018:55). Penulis mengolah dan menganalisis data dengan pendekatan kualitatif sehingga permasalahan yang dibahas bisa digambarkan dimana penulis akan memaparkan dan menggambarkan bagaimana hubungan sentralisasi keuangan HKBP dengan kinerja HKBP secara organisatoris dengan melihat bagaimana tata kelola HKBP kedepan secara kelembagaan.

### **Pembahasan**

Sebelum membahas HKBP sebagai sebuah organisasi keagamaan yang juga punya struktur dan aturan main layaknya organisasi yang sifatnya umum ada kalanya kita sepakati dulu dan pahami dulu apa itu pengertian organisasi. Adapun pengertian organisasi menurut para ahli adalah Organisasi Menurut James D. Mooney: Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. James D Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Chester I Bernard: berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Stephen P. Robbins menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif

terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. J. William Schulze. Menurut J. William Schulze, organisasi adalah suatu penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang lingkup kerja dan segala hal yang berhubungan dengannya, yang disatukan dalam sebuah hubungan yang teratur dan sangat efektif untuk mencapai segala tujuan yang diinginkan (Stephen Robbins: 2016). HKBP juga merupakan salah satu organisasi yang juga disesain untuk mengembangkan berbagai model pengembangan untuk mendorong terwujudnya tujuan pelayanan kepada jemaat. Menurut Hasibuan (2013:24) organisasi adalah sebuah sistem yang bersifat formal, terstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok individu yang berkerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

HKBP sebagai sebuah organisasi butuh pengembangan dengan berbagai cara atau strategi, tetapi fokus pada upaya penguatan kelembagaan. Menurut Werner dan DeSimone dalam Kaswan (2018:104) pengembangan organisasi ialah aplikasi pengetahuan ilmu perilaku yang meliputi keseluruhan sistem pengembangan, perbaikan/peningkatan, dan penguatan yang telah disusun terhadap strategi, struktur, dan proses yang membawa kepada keberhasilan sebuah organisasi. Melalui sentralisasi keuangan sangat diharapkan bisa terwujud pengembangan organisasi dan bisa mendorong HKBP sebagai organisasi yang lebih terbuka dan punya visi dan misi terukur.

Untuk terwujudnya capaian itu dibutuhkanlah tata kelola keuangan atau tata kelola kelembagaan dalam bentuk sentralisasi keuangan. Sebelumnya harus kita lakukan dulu studi komparasi mengelola negara dengan mengelola gereja yang sama-sama punya basis dan latar belakang organisasi sekalipun berbeda objek kajian. Di pemerintahan kita sering mendengar istilah tata kelola pemerintahan dengan meminjam paradigma berpikirnya *good governance*. Menurut UNDP (dalam Darwinsyah, 2012 : 9), menyatakan ada tiga model *good governance* yaitu :

1. Kepemerintahan politik (*political governance*) yang mengacu pada proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan.
2. Kepemerintahan ekonomi (*economic governance*) yang mengacu pada proses pembuatan keputusan (*decision making process*) yang memfasilitasi kegiatan ekonomi didalam negeri dan berinteraksi diantara penyelenggara ekonomi. Kepemerintahan ekonomi memiliki implikasi terhadap masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.
3. Kepemerintahan administratif (*administrative governance*) yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Sesuai dengan definisi menurut UNDP bahwa *good governance* menyangkut tiga aspek yaitu pemerintahan yang baik dalam bidang politik, ekonomi, dan administrasi atau pembuatan kebijakan-kebijakan. *Governance* juga bisa diartikan sebagai mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* memiliki hakikat esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi dengan pengakuan hak berdasarkan pada pemerintahan hukum.

Prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah *good governance* (pemerintahan yang baik). *Good governance* sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh komponen organisasi harus mendukung pencapaian tujuan *good governance*.

Pengantar Kebijakan Publik. Tussman (dalam Muhhamad Ridha Suaib, 2015 : 143), menyatakan bahwa : “*Governance non by the best among all of as but by the best within each of as*. Pemerintahan itu dilaksanakan sebaiknya bukan oleh orang-orang yang terbaik diantara para aparatur negara, tetapi justru oleh kemampuan terbaik dari setiap individu aparatur negara yang bersangkutan”.

Safroni mengutip pendapat Sofian Efendi dan Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi (dalam Hayat, 2017 : 168), menyatakan bahwa :

1. Istilah *government* dan *governance* acapkali ditafsirkan secara sama dan dianggap mempunyai pengertian yang sama, yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga, atau negara. *Government* atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara.
2. *Governance* sejatinya sudah lama dikenal dalam ilmu administrasi atau ilmu politik. Hampir 120 tahun perkembangan *governance* diperbincangkan, sejak woodrow wilson memperkenalkan bidang ilmu administrasi sekitar 125 tahun lamanya. Oleh para praktisi dan teoritis administrasi negara indonesia, istilah *good governance* telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoror Tjokroamidjojo).
3. Sementara istilah pemerintahan (*government*) lebih dimaknai sebagai lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Dan tata pemerintahan (*governance*), lebih pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen, yaitu pola hubungan antara pemerintahan, partai politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan.

Konsep yang dipaparkan diatas memberikan pengertian yang jelas antara *government* dan *governance* yang acap kali disamakan dalam konteks penafsiran maupun substansinya. Jelas keduanya mempunyai pengertian yang tidak sama dan mempunyai substansi yang berbeda pula. *Governance* adalah tata pemerintahan yang menyangkut berbagai aspek lembaga secara keseluruhan, termasuk pemerintah (*government*) serta aspek lainnya, seperti lembaga politik, sosial, dan ekonomi.

### **Prinsip-Prinsip Good Governance**

Dalam peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas :

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

- f. Efisiensi dan efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

United Nations Development Program/UNDP (dalam Neneng Siti Maryam, 2016 : 5), menyatakan ada 14 prinsip good governance, yaitu :

- a. Wawasan kedepan (*visionary*);
- b. Keterbukaan dan transparansi (*openess and transparency*);
- c. Partisipasi masyarakat (*participation*);
- d. Tanggung jawab (*accountability*);
- e. Supremasi hukum (*rule of law*);
- f. Demokrasi (*democracy*);
- g. Profesionalisme dan kompetensi (*profersionalism and competency*);
- h. Daya tanggap (*responsiveness*);
- i. Keefisienan dan keefektifan (*efficiency and effectiveness*);
- j. Desentralisasi (*decentralization*);
- k. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private sector and civil cosiety parnetship*);
- l. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequallity*);
- m. Komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to enviromental protection*);
- n. Komitmen pasar yang fair (*commitment to fair market*)

Mengelola negara dan mengelola gereja pada hakikatnya adalah sama dengan menggerakkan SDM yang ada dan ada harus ada konsep dan grand desain dalam bentuk tata kelola organisasi. Untuk itu penguatan kelembagaan HKBP bisa dilakukan apabila punya tata kelola yang baik.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama kebijakan sentralisasi keuangan di HKBP akan diberlakukan dengan tujuan untuk membangun HKBP yang lebih transparan dan punya organisasi yang kuat dalam hal tata kelola agar HKBP bisa jadi contoh bagi organisasi yang lain dalam hal mengelola semua potensi yang ada dalam dirinya dengan lebih bagus, adil, dan lebih transparan. Sebagaimana yang penulis kutip dalam laman HKBP or.id Pengelolaan Sentralisasi dibangun berdasarkan nilai-nilai:

*Pertama*, Kesetaraan (Equality): kesetaraan semua pelayan memiliki kesetaraan kesejahteraan berdasarkan golongan, masa kerja dan jabatan serta tunjangan lainnya. Equality juga ada pada gereja semakin terdistribusinya tenaga pelayan di seluruh pelayan HKBP merata, selama ini penerimaan tenaga pelayan hanya pada gereja yang mampu.

*Kedua*, berkeadilan (justice): didasarkan pada tingkat kemahalan lokal dan insentif pelayanan. Setiap pelayan yang giat dan rajin melakukan pelayanan dan berdampak baik pada penerimaan sentralisasi akan diapresiasi berupa penghargaan dengan tambahan insentif.

*Ketiga*, berkelanjutan (sustainable): setiap pelayan memiliki kepastian kesejahteraan tahun demi tahun karena kesejahteraan bukan lagi ditentukan oleh tempat pelayanan. Dipihak lain pimpinan HKBP akan lebih mudah mengelola manajemen SDM.

*Keempat, Kekeluargaan (fraternity):* semua pembiayaan dalam HKBP ditanggung bersama oleh semua HKBP yang dikepalai oleh Ephorus di Kantor Pusat HKBP. Sistem Sentralisasi Keuangan menjadikan kita semua menjadi satu rumah besar yang didalamnya semua anggota keluarga mengambil peran dan tanggungjawab (*Sumber: <https://hkbp.or.id/a>*).

Dari nilai- nilai di atas dapat kita simpulkan bahwa sentralisasi keuangan adalah sebuah grand desain manajemen keuangan berbasis kebutuhan jemaat, berbasis visi jauh kedepan, berbasis pada penguatan kelembagaan, dan mampu menjawab semua permasalahan dalam tubuh HKBP yang pada akhirnya menguatkan internal secara kelembagaan. Secara khusus adapun dampak dari sentralisasi keuangan ini adalah:

*Pertama,* ketimpangan dan kesenjangan keuangan yang terjadi selama ini dalam hal penggajian pelayan penuh waktu bisa teratasi. Dengan demikian istilah lahan basah dan lahan kering dalam HKBP bisa dieliminir. Dengan adanya sentralisasi keuangan ini terjadi pemerataan pendapatan atau belanja pelayan penuh waktu. Inilah akar masalah selama ini karena banyak pendeta atau pelayan penuh waktu yang sudah senior tetapi karena selalu ditempatkan di desa merasa mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan ini bisa diakhir dengan adanya “grand desai” sentralisasi keuangan ini.

*Kedua,* HKBP bisa jadi role model atau contoh teladan organisasi yang mengandalkan tata kelola yang bersih dan transparan atas dasar kejujuran. Dengan demikian tingkat kepercayaan HKBP oleh jemaat, oleh lembaga asing bisa meningkat. Ini tentu jadi sebuah kekuatan besar betapa HKBP kedepan akan semakin punya dampak besar bagi negara ini dan juga bagi jemaatnya.

*Ketiga,* dengan sentralisasi keuangan ini apa yang jadi visi dan misi HKBP bisa terwujud dengan baik dimana kekuatan internal semakin kuat (*internal strength is getting stronger*). Rongrongan internal tidak ada lagi, dengan demikian semua pelayan penuh waktu dengan kolaborasi jemaat bisa mendorong terwujudnya HKBP sebagai sebuah Gereja yang punya tata kelola yang sangat bagus. Harapan kita problematika internal HKBP bisa teratasi dengan baik karena tantangan internal ini adalah masalah yang harus di atasi dengan baik. Terlebih Visi dan Misi HKBP adalah menjadi berkat bagi dunia (*a blessing to the world*). Secara sederhana, berkat bagi dunia dalam konteks kekinian adalah bahwa jemaat HKBP dimanapun berada selalu membawa perubahan, berguna bagi sesama, membawa damai, kesejukan, dan toleransi.

Memang visi dan misi itu sangat agung, tetapi masalah internal HKBP tentu pasti ada layaknya adanya sebuah dinamika dalam organisasi. Masalah internal harus dibereskan sebelum kita berbicara keluar. Problematika yang bersifat internal musti dituntaskan dengan tujuan, agar misi HKBP jadi berkat bagi luar dirinya bisa terwujud dengan baik (*manifested well*), sesuai dengan panggilan (*according to the call*) kita orang Kristen. Terlebih lagi, realitas sosial yang kita hadapi adalah bahwa HKBP hidup dalam keberagaman (*pluralism*) dan berdampingan dengan berbagai latar belakang sosial, suku, dan agama yang berbeda.

Sekali lagi, pluralisme dalam berbangsa dan bernegara adalah realitas sosial yang tidak bisa kita pungkiri lagi (sangat natural). Artinya, HKBP hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang agama, sosial dan suku yang berbeda. Bagaimana HKBP berguna, berkat bagi sesama adalah tugas dan panggilan HKBP. Untuk itu, harus ada desain, strategi, dan komitmen untuk mendorong

HKBP agar bisa jadi berkat bagi dunia dan inilah harapan kita dari grand desain “sentralisasi keuangan”.

Terlepas daripada itu dampak dari sentralisasi keuangan sangat kita harapkan bagi HKBP karena penguatan tata kelola organisasi yang lebih baik dengan basis kejujuran dan transparansi dan punya akses yang baik kepada semua jemaat. Dengan tata kelola organisasi yang lebih transparan dan bersih maka dampaknya bagi HKBP yang kita harapkan adalah:

*Pertama*, perlu sebuah orientasi pelayanan dengan konsep pemberdayaan dan pengembangan jemaat sebagai paradigma baru dalam pelayanan. Artinya cerita surga dan akhirat bukan lagi topik sentral dalam bergereja, tetapi bagaimana pengembangan kejemaatan dan pemberdayaan jemaat (*empowering the congregation*) sehingga punya peran yang strategis dalam kehidupan masyarakat. HKBP harus fasih dan lugas menguraikan bagaimana konsep pemberdayaan (*empowerment concept*) dan pengembangan jemaat (*social empowerment*), termasuk pemberdayaan Pendeta dengan membuat pelatihan –pelatihan bagi pendeta (rohaniawan yang punya skill) supaya punya keahlian ditengah jemaat. Konsep pemberdayaan jemaat dengan melihat teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli jemaat (*the purchasing power*) harus ditingkatkan atau grafiknya naik kalau kita ingin melihat jemaat punya potensi kedepan.

*Kedua*, memanfaatkan segala potensi jemaat yang ada dalam tubuh HKBP sebagai upaya mendorong perubahan dan pengembangan. HKBP harus bisa menguraikan dengan jelas dan mudah dipahami bahwa selama ini potensi HKBP kurang diberdayakan. Padahal banyak jemaat yang punya potensi hebat, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, teknologi, yang bisa dimanfaatkan untuk saling menolong dan menguatkan. Konsep pemberdayaan potensi jemaat (*potential empowerment of the congregation*) HKBP tetap dalam koridor pelayanan kepada semua jemaat. Perlu sebuah pemikiran yang baru (*new mindset*) bagaimana supaya segala potensi dalam HKBP didata, atau dibangun database sehingga ini bisa menjadi modal dasar dalam membangun jemaat HKBP atas dasar keinginan untuk maju bersama (*spirit egaliterisme*).

*Ketiga*, HKBP harus bisa naik kelas (*next grade*) dan jangan lagi tinggal kelas. Kalau HKBP hanya berguna untuk jemaatnya saja ini merupakan kemunduran bagi HKBP. Kedepan HKBP harus mampu mendorong perubahan (*encourage change*) dimana HKBP juga berguna bagi semua orang (termasuk suku dan agaman yang berbeda), berguna untuk bangsa ditengah masyarakat yang plural. Jemaat HKBP harus berguna bagi umat yang lain. Bagaimana supaya sampai kesana tentu butuh pemikiran yang baru.

Maka pembenahan internal yang harus dilakukan sebelum berbicara pada manfaat HKBP bagi umat lain (berkat bagi dunia). HKBP harus mampu mengambil peran strategis peran sentral mendorong keberagaman, toleransi yang tinggi atas dasar kejujuran, mitra kerja bagi siapa saja yang berguna untuk kemanusiaan. Dengan demikian HKBP kedepan akan semakin kuat (*HKBP is getting stronger*) dan diperhitungkan (punya bargaining position) dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di negara ini. Di Sumatera Utara peran HKBP semakin terpinggirkan, maka perlu membangun jati diri agar dapat menentukan masa depan Sumatera Utara ini dengan segala dinamika yang terjadi. Dalam rangka inilah penguatan

kelembagaan sangat dibutuhkan dimana HKBP mencirikan diri sebagai sebuah organisasi yang punya tata kelola yang kuat dan transparan serta lebih profesional.

### **Penutup**

Untuk membangun tata kelola yang baik sebagai upaya untuk penguatan kelembagaan HKBP dengan model sentralisasi keuangan ini sangat kita harapkan bisa berhasil dengan baik dan didukung oleh semua pihak dan juga internal HKBP secara kelembagaan. Dengan adanya model tata kelola sentralisasi keuangan ke Pearaja diharapkan ketimpangan, kesenjangan, dan transparansi bisa dilakukan untuk masa depan HKBP yang lebih baik karena terjadi penguatan kelembagaan. Harapan kita kepada HKBP adalah sebuah misi suci agar bisa mewujudkan pelayanan yang holistik dan berguna untuk bangsa dan negara ini. Harapan itu tidaklah sulit asalkan ada komitmen dan keinginan serta tekad bulat bersama dan saling memahami dengan mengedepankan kasih Kristus. Inilah yang kita harapkan dari HKBP kedepan. Untuk itu kebijakan sentralisasi keuangan sangat kita harapkan menguatkan HKBP secara organisasi dan bisa jadi “*role model*” (contoh) bagi organisasi yang lain. Transparansi, kejujuran, akuntabilitas, aksesibilitas, visioer mencegah ketimpangan dan kesenjangan adalah dampak yang sangat kita harapkan dari kebijakan sentralisasi keuangan yang sangat visioner ini.

### **Daftar Pustaka**

- Dwiyanto, Agus, (2018). **Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik**, Edisi Revisi ke 2, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hayat, (2017). **Manajemen Pelayanan Publik**, Cetakan ke 1, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adatul, Isti. Kunisyah, (2018). “**Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DiIndonesia Perspektif Hukum Islam**”, Paradigma, Yogyakarta.
- Darwinsyah, (2012). “**Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik**”. Bandung
- Kaswan. 2019. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Bandung: Yrama Widya.
- Neneng, Maryam, Siti, (2016). “**Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik**”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VI Nomor 1, hal 5-7, Bandung.
- Stephen P. Robbins; (2016) Timothy A. *Perilaku organisasi*. Edisi ke-16, Salemba 4, Jakarta
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., & Widia, R. (2018). *The Influence of Work Motivation to Work Achievement of Employees in PT. Alva Karya Perkasa Bandung*. *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 1(1), 42-62. Bandung